Katalog: 4601001.63

2017

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

https://kalsel.bps.go.id

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

2017

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN

https://kalsel.bps.go.id

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

STATISTIK POLITIK DAN KEAMANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2017

No. Katalog : 4601001.63
No. ISBN : 978-602-0934-87-7
No. Publikasi : 63520.1805

Ukuran Buku : 21,5 cm x 29,7 cm

Jumlah Halaman : viii+50 Halaman

Naskah:

Bidang Statistik Sosial

Cover:

Bidang Statistik Sosial

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Dicetak oleh:

CV. Karya Bintang Musim

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

https://kalsel.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Statistik Politik dan Keamanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2017 ini menyajikan gambaran umum tentang keadaan politik dan keamanan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Data yang disajikan antara lain data terkait pemilihan umum, keanggotaan DPRD, dan peristiwa tindak kejahatan, pelaku dan korban kejahatan. Data tentang sarana prasarana keamanan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan juga dihadirkan dalam publikasi ini.

Sumber data adalah data sekunder yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait seperti Kepolisian Daerah, Kepolisian Resort, KPUD, sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat serta hasil Pendataan Potensi Desa 2014.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan guna perbaikan publikasi pada masa mendatang. Semoga publikasi ini bermanfaat bagi pengguna data.

https://kalsel.bps.go.id

Banjarmasin, November 2018

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Selatan

Ir. Diah Utami, M.Sc.

https://kalsel.bps.go.id

DAFTAR ISI

Halaman

Kata Pengantar iii

Daftar Isi v

Daftar Tabel vi

Daftar Grafik viii

Bab I Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Maksud dan Tujuan 3

1.3 Ruang Lingkup 4

Bab II Metodologi 5

2.1 Jenis dan Sumber Data 5

2.2 Konsep dan Definisi 5

2.3 Penjelasan Teknis 7

Bab III Gambaran Umum Keamanan 9

3.1 Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah 9

3.2 Peristiwa Kejahatan, Pelaku dan Korban Tindak Kejahatan 10

Bab IV Gambaran Umum Politik 13

4.1 Pemilihan Umum 13

4.2 Karakteristik dan Peran DPRD 14

https://kalsel.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2017 19

Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja, 2017 20

Tabel 3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, Tahun 2014 21

Tabel 4. Jumlah Anggota Hansip/Linmas dan Rasio Hansip/Linmas per Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, 2014 22

Tabel 5. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017 23

Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017 24

Tabel 7. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Crime Clearance Rate*) Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017 25

Tabel 8. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*) Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017 26

Tabel 9. Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017 27

Tabel 10. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan, Tahun 2014 28

Tabel 11. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Perkelahian Massal Setahun Terakhir Tahun 2014 31

Tabel 12. Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan Tahun 2017 33

Tabel 13. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Warga Untuk Menjaga Keamanan Lingkungan Selama Setahun Terakhir, 2014 38

Tabel 14. Jumlah Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014 Menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik 39

Tabel 15. Jumlah Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Kondisi 31 Desember 2017) 42

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 16. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Terakhir Menurut Kabupaten/Kota 43

Tabel 17. Jumlah Penduduk yang Terdaftar. Menggunakan Hak Pilih. dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Gubernur 2015 Menurut Kabupaten/Kota 44

Tabel 18. Jumlah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Terakhir Jumlah Putaran Pelaksanaan Pemilukada, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung Menurut Kabupaten/Kota..... 45

Tabel 19. Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Terakhir serta Jabatan Sebelum Terpilih Menurut Kabupaten/Kota..... 46

Tabel 20. Hasil Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Terakhir serta Jabatan Sebelum Terpilih Menurut Kabupaten/Kota..... 47

Tabel 21. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Menurut DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Kalmantan Selatan Tahun 2016-2017..... 48

Tabel 22. Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017 49

Tabel 23. Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa dan Kerusuhan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016-2017 50

https://kalsel.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Indeks Ketahanan Gatra Politik 2010 – 2016 1

Gambar 1.2 Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan 2010 – 2016 3

Gambar 3.1 Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016 – 2017 10

Gambar 3.2 *Crime Clearance Rate* Menurut Kabupaten/Kota 2017..... 11

Gambar 3.3 Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan Tahun 2017..... 12

Gambar 4.1 Komposisi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menurut Asal Partai, 2014 – 2019 13

https://kalsel.bps.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Politik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan negara, kekuasaan, sistem pengambilan keputusan publik, kebijaksanaan umum, dan pembagian serta penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Politik merupakan hal penting dalam kehidupan bernegara demi terciptanya tujuan dari suatu negara.

Semenjak era reformasi, situasi dan kondisi politik di Indonesia mengalami perubahan dan perkembangan yang sangat signifikan khususnya terkait keterbukaan dalam bidang politik. Terlebih lagi sejak keluarnya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah yang berdampak pada semakin berkembangnya dinamika kehidupan politik terutama di tingkat pemerintah daerah. Politik menjadi salah satu gatra yang mencerminkan ketahanan nasional termasuk Provinsi Kalimantan Selatan.

https://kalsel.bps.go.id

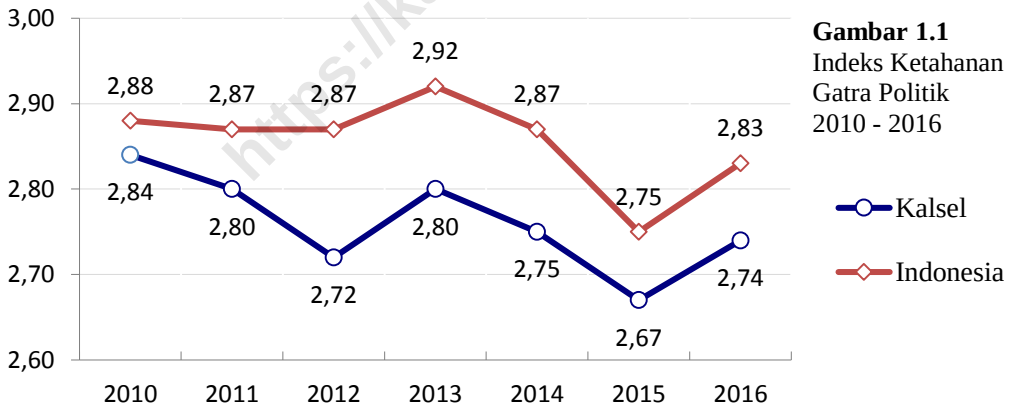

Gambar 1.1
Indeks Ketahanan Gatra Politik 2010 - 2016

Sumber: Buku Profil Ketahanan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

Hasil studi Lemhanas tahun 2010-2016 menunjukan bahwa indeks ketahanan gatra politik Provinsi Kalimantan Selatan relatif tidak mengalami perubahan. Selama periode itu Provinsi Kalimantan Selatan berada pada tingkat moderate yaitu cukup tangguh yang berada di level 2,6-3,4. Indeks ketahanan gatra politik Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2016 adalah sebesar 2,74 dalam skala 1 s.d 6. Nilai indeks tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,07 poin dibandingkan tahun 2015 yang sebesar

2,67. Angka ini mengembalikan nilai indeks gatra politik Provinsi Kalimantan Selatan seperti tahun 2014. Namun nilai indeks ini masih dibawah nilai indeks 6 tahun yang lalu yang sebesar 2,84. Nilai indeks pada level cukup tangguh mencerminkan bahwa keuletan dan ketangguhan masyarakat Kalimantan Selatan berada pada kondisi cukup memadai dalam menghadapi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan baik dari luar maupun dari dalam.

Tabel 1.1
Peringkat Ketahanan

Peringkat Ketahanan	Konversi Indeks	Simbol Warna	Makna Strategis
(1)	(2)	(3)	(4)
Rawan	1,0 - 1,8	Merah	*Alert*
Kurang Tangguh	>1,8 - 2,6	Kuning	*Warning*
Cukup Tangguh	>2,6 - 3,4	Hijau	*Moderate*
Tangguh	3,4 - 4,2	Biru	
Sangat Tangguh	>4,2 - 5,0	Ungu	*Sustainable*

Sumber: Buku Profil Ketahanan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

https://kalsel.bps.go.id

Indeks gatra politik provinsi Kalimantan Selatan selama periode 2010-2016 selalu berada di bawah indeks rata-rata nasional indeks ketahananan gatra politik nasional. Seperti Provinsi Kalimantan Selatan, nilai indeks ketahanan gatra politik Indonesia tidak pernah beranjak dari level *moderate* cukup tangguh. Namun pergerakan indeks gatra politik Provinsi Kalimantan Selatan selaras dengan indeks nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan juga terjadi di banyak provinsi lainnya di Indonesia.

Dinamika politik di suatu wilayah berpengaruh terhadap situasi dan kondisi keamanan di wilayah tersebut. Rasa aman adalah salah satu kebutuhan sosial setiap manusia yang merupakan kebutuhan fundamental selain kebutuhan biologis. Rasa aman merupakan salah satu hak asasi setiap manusia dan oleh karenanya pemerintah dalam hal ini berkewajiban memberikan rasa aman kepada seluruh rakyatnya. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa pemerintah dan negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kewajiban ini secara eksplisit juga tertuang dalam Pasal 30 ayat (4), amandemen kedua UUD 1945 yang antara lain menyebutkan bahwa Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

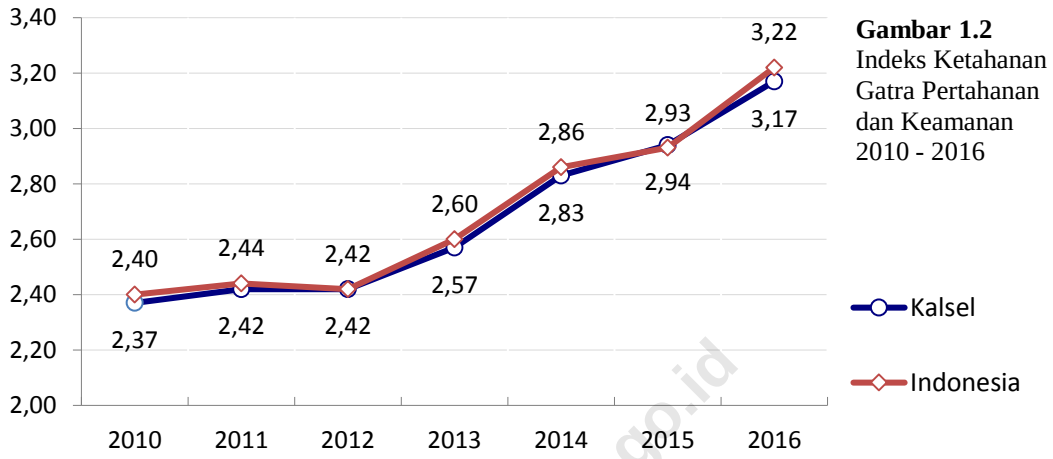

Gambar 1.2
Indeks Ketahanan Gatra Pertahanan dan Keamanan 2010 - 2016

Sumber: Buku Profil Ketahanan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016

https://kalsel.bps.go.id

Hasil studi Lemhanas menunjukan bahwa indeks ketahanan gatra pertahanan dan keamanan Provinsi Kalimatan Selatan selama 2010-2013 berada pada tingkat kurang tangguh (*warning)* yang ditunjukan dengan nilai indeks kurang dari 2,6. Sejak Tahun 2014, indeks gatra pertahanan dan keamanan Provinsi Kalimantan Selatan telah memasuki tingkat cukup tangguh (*moderate*) yaitu sebesar 2,83. Indeks gatra ini terus mengalami peningkatan hingga mencapai 3,17 pada tahun 2016. Dibandingkan indeks ketahanan gatra pertahanan dan keamanan nasional maka indeks gatra Provinsi Kalimantan Selatan mencerminkan rata-rata nasional. Selama periode 2010-2016 nilai indeks gatra Kalimantan Selatan relatif tidak berbeda dengan indeks nasional.

1.2. Maksud dan Tujuan

Perkembangan situasi politik dan keamanan yang dinamis cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat. Oleh karenanya diperlukan ketersediaan informasi gambaran kondisi politik dan keamanan yang diharapkan bisa memberikan masukan bagi perencanaan pembangunan yang dilakukan. Selain itu, dengan publikasi ini diharapkan bisa memberikan gambaran kondisi terakhir politik dan keamanan serta memonitornya dari waktu ke waktu.

Secara umum, tujuan penyusunan publikasi ini adalah memberikan gambaran makro mengenai situasi dan kondisi politik dan keamanan di suatu wilayah. Secara khusus, penyusunan publikasi ini ditujukan untuk memperoleh gambaran secara lengkap mengenai kejadian tindak kriminalitas, ketersediaan aparat penegak hukum, konflik massal dan peran serta DPRD kabupaten/kota dan provinsi.

1.3. Ruang Lingkup

Publikasi Statistik Politik dan Keamanan 2018 ini menyajikan gambaran data terkait politik dan keamanan di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan hingga tingkat kabupaten dan kota tahun 2017. Data terkait pemilu legislatif dan pemilu kepala daerah mengacu pada pelaksanaan pemilihan umum terakhir. Sumber data lainnya yang digunakan adalah hasil pengumpulan data BPS. Salah satu sumber data adalah Pendataan Potensi Desa yang terakhir dilaksanakan tahun 2014.

https://kalsel.bps.go.id

BAB II
METODOLOGI

2.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam publikasi ini berasal dari data sekunder BPS dan dinas/instansi terkait. Sumber data BPS berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional 2017, Kalimantan Selatan Dalam Angka 2018, dan pendataan Potensi Desa 2014. Sumber data dinas/instansi terkait antara lain kepolisian, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kepolisian dan Komisi Pemilihan Umum.

2.2. Konsep dan Definisi

https://kalsel.bps.go.id

Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap

Pemilihan umum (pemilu) adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU No. 22/2007). Pemilu yang dicakup meliputi pemilu DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provins, pemilu Presiden, dan pemilu Gubernur, dan pemilu Bupati/Walikota.

Angka partisipasi penduduk dalam pemilu (*voters turn out*) adalah persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu

Golongan putih (golput) adalah pemilih yang tidak menggunakan hak pilih.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga legislatif yang mewakili rakyat di tingkat provinsi atau kabupaten/kota dalam mengawasi pemerintah daerah dalam menjalankan tugas.

Peristiwa kejahatan (kriminalitas)/pelanggaran terdiri dari:

- **Tindak kejahatan/kriminalitas atau pelanggaran** merupakan perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia.
- **Peristiwa yang dilaporkan** ialah setiap peristiwa yang diterima kepolisian dari laporan masyarakat, atau peristiwa dimana pelakunya tertangkap tangan oleh kepolisian.
- **Peristiwa yang diselesaikan oleh kepolisian** adalah peristiwa yang berkas perkaranya sudah siap atau telah diserahkan kepada jaksa; dalam hal delik aduan, pengaduan dicabut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan menurut undang-undang; peristiwa yang telah diselesaikan oleh kepolisian berdasarkan azas *Plichmatigheid*; peristiwa yang tidak termasuk kompetensi kepolisian; peristiwa yang tersangkanya meninggal dunia dan peristiwa yang telah kadaluwarsa.

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan; turut melakukan kejahatan; menyuruh melakukan kejahatan; membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan; serta membantu melakukan kejahatan.

Klasifikasi pelaku kejahatan menurut umur (KUHP) :

- Anak-anak adalah orang yang berumur kurang dari 16 tahun.
- Dewasa adalah orang yang berumur 16 tahun dan lebih.
- Umum adalah anak-anak dan dewasa.

Korban Kejahatan adalah seseorang atau harta bendanya yang selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.

https://kalsel.bps.go.id

2.3. Penjelasan Teknis

Beberapa indikator keamanan yang ditampilkan dalam publikasi ini adalah :

a. Angka Kejahatan per 100.000 Penduduk (*crime rate*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan pada tahun t}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100.000$$

b. Selang Waktu Kejahatan Tahun t (*crime clock*)

$$= \frac{365 \times 24 \times 60 \times 60}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan tahun t}} \times (\text{ detik })$$

c. Persentase Penyelesaian Peristiwa Kejahatan (*crime clearance rate*)

$$= \frac{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah peristiwa kejahatan yang dilaporkan}} \times 100 (\ \%\ )$$

https://kalsel.bps.go.id

https://kalsel.bps.go.id

BAB III
GAMBARAN UMUM KEAMANAN

3.1. Sarana dan Prasarana Keamanan Wilayah

Untuk mewujudkan situasi dan kondisi yang aman di suatu wilayah tidak bisa lepas dari tersedianya sarana dan prasarana keamanan di wilayah tersebut. Pada tahun 2017 terdapat sebanyak 13 Kantor Kepolisian Resort (Polres) dan Kepolisian Resort Kota (Polresta), 135 Kantor Kepolisian Sektor (Polsek) dan 45 pos polisi (tidak termasuk jumlah pos polisi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tabalong). Berdasarkan jumlah kecamatan maka terdapat 6 Kabupaten/Kota yang telah memiliki kantor Polsek di masing-masing kecamatan. Kabupaten/Kota tersebut adalah Barito Kuala, Tapin, Tabalong dan Tanah Bumbu serta Banjarmasin dan Banjarbaru. Untuk Kabupaten/Kota lainnya masih terdapat penduduk warga suatu kecamatan yang harus ke kecamatan terdekat untuk mendapat pelayanan di tingkat Kantor Kepolisian Resort.

Hasil Pendataan Podes Tahun 2014 menunjukan bahwa dari 2.008 desa/kelurahan di Kalimantan Selatan terdapat sebanyak 1.791 desa yang harus ke desa lain untuk mendapatkan pelayanan di kantor polisi. Permasalahan sarana dan prasarana infrastuktur jalan sangat menentukan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang keamanan. Masih terdapat masyarakat di 210 desa/kelurahan yang mengalami kesulitan dan masyarakat 38 desa yang menyatakan sangat sulit untuk mengakses kantor polisi terdekat di desa lain.

Jumlah dan kepadatan penduduk berdampak pada kompleksitas permasalahan keamanan yang menjadi penentu kebutuhan jumlah aparatur kepolisian dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat selain faktor lainnya seperti jarak, kondisi geografi dan tingkat kemajuan sosial ekonomi di suatu wilayah. Jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2017 adalah sebanyak 4,1 juta jiwa. Kota Banjarmasin merupakan kabupaten/kota dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu sebanyak 9.533 jiwa menempati setiap km^2. Sedangkan rasio jumlah aparat kepolisian per penduduk di Kota Banjarmasin adalah sebesar 792. Hal ini berarti setiap 1 orang polisi yang bertugas di Kota Banjarmasin melayani hampir sekitar 792 orang penduduk.

https://kalsel.bps.go.id

Unsur pertahanan dan keamanan selain aparat polisi adalah anggota hansip dan linmas. Hansip/Linmas berperan untuk membantu menjaga keamanan di tingkat desa/kelurahan. Berdasarkan hasil pendataan Podes 2014 tercatat terdapat sebanyak 13.265 orang Hansip/Linmas yang bertugas pada 2.008 desa/kelurahan. Kota Banjarbaru memiliki rasio anggota hansip/linmas per desa/kelurahan tertinggi di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebanyak 15 orang. Artinya secara rata-rata satu desa/kelurahan di Kota Banjarbaru memiliki 15 orang anggota hansip dan linmas. Kabupaten Balangan hanya memiliki 1 orang Hansip/Linmas untuk setiap desa/kelurahan.

3.2. Peristiwa Kejahatan, Pelaku dan Korban Tindak Kejahatan

Jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017, jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan di 13 kantor polres dan polresta adalah sebanyak 5.494 kasus. Angka ini mengalami penurunan sebesar 1,1 persen dibandingkan tahun 2016. Kota Banjarmasin merupakan wilayah dengan jumlah tindak kejahatan tertinggi yang dilaporkan yaitu sebanyak 1.885 kasus. Sebaliknya jumlah tindak kejahatan yang dilaporkan paling sedikit selama 2017 adalah terjadi di Kabupaten Balangan, yaitu hanya 112 kasus.

https://kalsel.bps.go.id

Gambar 3.1. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017

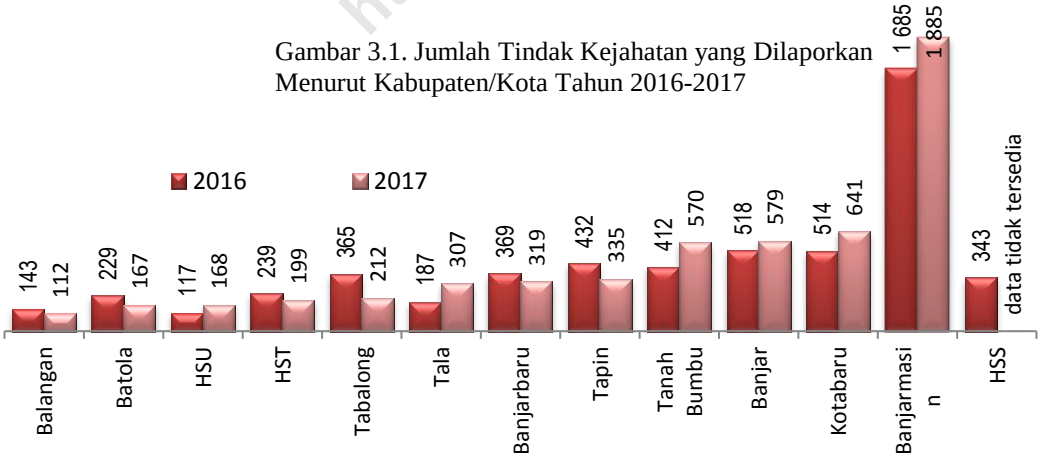

Pada tahun 2017, terdapat sebanyak 4 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan angka tindak kejahatan yang dilaporkan. Kabupaten/kota tersebut adalah Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Banjarmasin. Persentase kenaikan terbesar terjadi di Kabupaten Tanah Laut yaitu sebesar 64,2 persen dibandingkan tahun

sebelumnya. Persentase penurunan terbesar tindak kejahatan yang dilaporkan pada tahun 2017 adalah Kabupaten Barito Kuala yaitu mengalami penurunan sebesar 27,1 persen dibandingkan tahun 2016.

Penurunan jumlah kasus yang dilaporkan selama periode 2015-2017 tidak diikuti dengan peningkatan persentase penyelesaian tindak kejahatannya (*crime clearance rate*). *Crime clearance rate* Provinsi Kalimantan Selatan selama 2017 adalah sebesar 79,6 persen atau turun 1,6 poin dibandingkan tahun 2016. Padahal selama periode 2015-2016, c*rime clearance rate* sempat meningkat dari 79,1 persen menjadi 81,2 persen atau naik 2,1 poin. Kabupaten/kota dengan tingkat penyelesaian kejahatan tertinggi adalah Kabupaten Tanah Laut dengan c*rime clearance rate* sebesar 94,8 persen dan yang terendah di Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebesar 67,9 persen.

www.kalsel.bps.go.id

Gambar 3.2 *Crime Clearence Rate*
Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2017 (Persen)

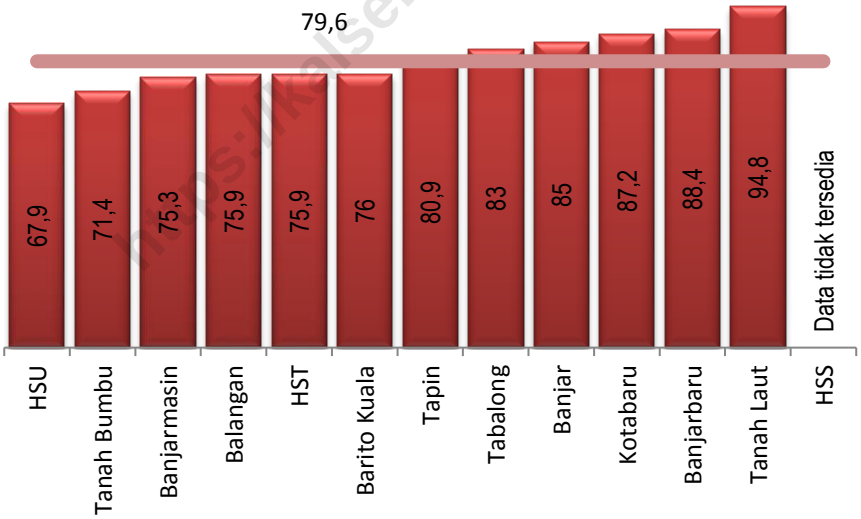

Tingkat keamanan juga bisa diindikasikan dari selang waktu terjadinya tindak kejahatan (*time clock*). Semakin pendek selang waktu terjadinya kejahatan menandakan lebih seringnya tindak kejahatan terjadi. Selama periode 2015-2017, selang waktu terjadinya tindak kejahatan di Provinsi Kalimantan Selatan terus mengalami peningkatan, dari 1 jam 20 menit 0 detik pada tahun 2015 menjadi 1 jam 35 menit 41 detik pada tahun 2017. Hal ini sejalan dengan penurunan tindak kejahatan yang dilaporkan selama peridoe 2015-2017.

Situasi dan kondisi keamanan di suatu wilayah juga dapat dilihat dari besarnya angka kejahatan (*crime rate).* Setiap penduduk memiliki resiko terkena tindak kejahatan. Semakin besar *crime rate*, maka resiko penduduk yang terkena tindak kejahatan semakin besar dan ini menandakan berkurangnya tingkat keamanan. Resiko penduduk terkena tindak kejahatan di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2017 sebesar 133. Angka ini mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016 di mana angkanya sebesar 143

Kota Banjarmasin masih merupakan wilayah yang penduduknya beresiko paling besar terkena tindak kejahatan dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Setiap 100.000 penduduk Banjarmasin, 272 orang di antaranya beresiko terkena tindak kejahatan pada tahun 2017. Sebaliknya kabupaten dengan resiko terkecil penduduknya terkena tindak kejahatan adalah Kabupaten Barito Kuala, yaitu 55 orang dari 100.000 penduduk Tanah Laut beresiko mengalami tindak kejahatan.

Tindak kejahatan yang sering terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan selama tahun 2017 adalah kejahatan narkotika dan psikotopika yaitu sebesar 20,1 persen. Pencurian dengan pemberatan dan kejahatan terhadap ketertiban umum merupakan jenis tindak kejahatan tertinggi lainnya yaitu sebesar 14,2 persen dan 13,3 persen.

https://kalsel.bps.go.id

.

Gambar 3.3
Jumlah Kejahatan Menurut Jenis Kejahatan Tahun 2017

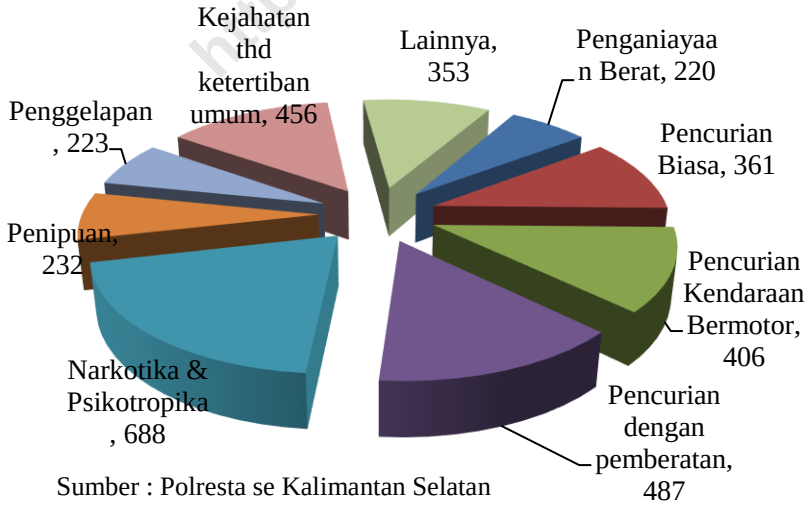

Sumber : Polresta se Kalimantan Selatan

BAB IV. GAMBARAN UMUM POLITIK

4.1. Pemilihan Umum

Pemilu legislatif tahun 2014 diikuti oleh 12 partai politik yang telah lolos seleksi oleh Komisi Pemilhan Umum. Hasil pemilu legislatif di Kabupaten/Kota tidak semua partai politik yang berhasil mengantarkan calon legislatifnya sebagai anggota DPR. Partai Golongan Karya dan Partai Persatuan Pembangunan berhasil menempatkan calon legislatifnya ke kursi DPRD di tingkat kabupaten/kota dan provinsi. Untuk DPR provinsi Kalimantan Selatan hanya ditempati oleh 10 partai. Partai PKPI dan PBB tidak berhasil meraih suara pemilih untuk merebut jatah kursi DPRD. Sebagai partai politik yang telah berpengalaman dalam pemilu, Partai Golkar, PPP dan PDI-P memperoleh suara terbanyak di Provinsi Kalimantan Selatan. Hal ini dibuktikan bahwa Golkar memperoleh 13 kursi, PDI-P sebanyak 8 kursi dan PPP sebanyak 7 kursi dari 55 kursi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

https://kalsel.bps.go.id

Gambar 4.1. Komposisi Anggota DPRD Kalimantan Selatan Menurut Asal Partai 2014-2019

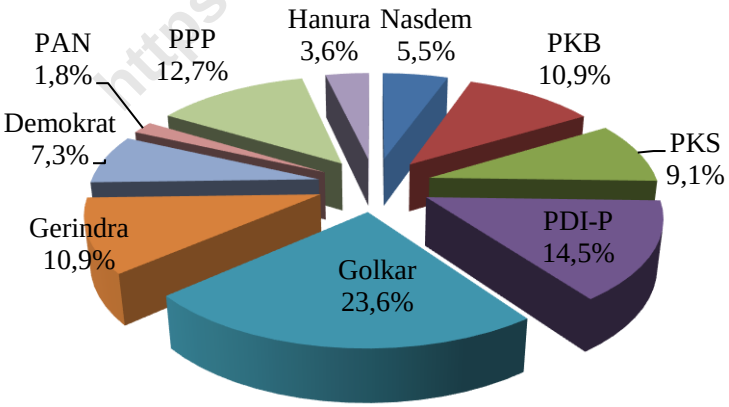

Partai Golkar masih mendominasi perolehan kursi DPRD kabupaten/kota. Partai berlambang pohon beringin ini memperoleh 98 kursi (22,8 persen) dari total 430 kursi DPRD 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. PDI-P dan PPP merupakan partai yang memperoleh kursi DPRD kabupaten/kota terbanyak selanjutnya yaitu masing-masing 56 kursi (11,2 persen) dan 52 kursi (10,5 persen). Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia adalah partai dengan perolehan paling sedikit. Partai yang berdiri pada tahun 1999 ini memperoleh 7 kursi di 5 kabupaten.

Berdasarkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPUD terdapat sebanyak 2,85 juta calon pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan. Pada hari pelaksanaan pemilukada terdapat 40,7 ribu orang tambahan yang tidak termasuk dalam (DPT) menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/surat keterangan. Angka partisipasi penduduk (*voters turn out)* dalam Pemilukada Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan adalah 66,3 persen. Dari angka tersebut terdapat sekitar 33,7 persen penduduk kalimantan selatan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang berperan untuk menentukan pemimpin daerah. Cukup tingginya angka non partisipasi pemilih menunjukkan ancaman tentang penduduk yang tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilu di masa mendatang. Kabupaten/kota dengan partisipasi pemilih tertinggi adalah Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Tengah dengan angka partisipasi sebesar 78,7 persen dan 77,1 persen. Sedangkan partisipasi terendah terdapat di Kabupaten Tanah Bumbu yaitu hanya sebesar 60, 6 persen.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan diikuti oleh 2 calon pasangan gubernur dan wakil gubernur yang didukung oleh partai politik dan 1 pasangan calon dari independen. Pemilukada yang dilaksanakan dalam 1 putaran menghasilkan pasangan Syahbirin dan Rudy Resnawan terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 2015-2020. Pasangan pemenang yang didukung oleh Partai Golkar, Gerindra PPP, PDI-P, PKS dan Hanura serta PAN memperoleh 739,6 ribu suara, atau sekitar (41,09 persen).

https://kalsel.bps.go.id

4.2. Karakteristik dan Peran DPRD

Anggota DPRD hasil pemilu legislatif tahun 2014 memiliki mekanisme pergantian antar waktu (PAW). Peristiwa PAW tersebut salah satunya dapat menyebabkan terjadinya perubahan komposisi anggota DPRD baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Perubahan komposisi meliputi aspek jenis kelamin, pendidikan dan juga kelompok umur. Pada keadaan 31 Desember 2017, anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berjenis kelamin perempuan sebanyak 7 orang (12,7 persen). dari

total 55 orang anggota DPRD. Persentase perempuan yang menjadi anggota DPRD provinsi tersebut masih di bawah komposisi ideal yang ditetapkan oleh UU No 10 Tahun 2008 pasal 57 yaitu sebesar 30 persen.

Kondisi yang sama terjadi pada tingkat kabupaten/kota di Kalimantan Selatan. Komposisi perempuan di DPRD kabupaten/kota belum mencapai pada angka 30 persen. Kabupaten/kota dengan persentase tertinggi untuk anggota DPRD perempuan adalah di Kabupaten Banjar dengan persentase sebesar 24,4 persen. Sedangkan keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten Tanah Bumbu adalah yanga terendah dibandingkan kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan. Dari total 35 anggota DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, hanya terdapat 2 orang yang berjenis kelamin perempuan (5,7 persen). Hal ini berarti terjadi pergantian anggota DPRD dari perempuan menjadi laki-laki selama periode 2016-2017, sebab pada akhir tahun 2016 jumlah anggota DPRD perempuan tercatat sebanyak 3 orang (8,6 persen).

DPRD memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menerapkan fungsi legislasinya, peran DPRD dapat dilihat dari produk hukum yang dihasilkan baik berupa peraturan daerah maupun keputusan anggota/pimpinan DPRD. Selama tahun 2017, terdapat 15 peraturan daerah yang disahkan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan 5 diantaranya merupakan perda inisiatif dewan.

https://kalsel.bps.go.id

https://kalsel.bps.go.id

LAMPIRAN

https://kalsel.bps.go.id

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 1. Luas Wilayah, Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2017

Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (km^2)	Jumlah kecamatan	Jumlah desa/ kelurahan	Jumlah penduduk (Ribu Jiwa)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	3 729,30	11	135	334,3
Kotabaru	9 422,73	21	202	331,3
Banjar	4 710,97	19	290	571,6
Barito Kuala	2 376,22	17	201	306,2
Tapin	2 174,95	12	135	186,7
Hulu Sungai Selatan	1 804,94	11	148	232,6
Hulu Sungai Tengah	1 472,00	11	169	266,5
Hulu Sungai Utara	951,25	10	219	231,6
Tabalong	3 599,95	12	131	247,1
Tanah Bumbu	5 066,96	10	149	343,2
Balangan	1 819,75	8	157	127,5
Banjarmasin	72,67	5	52	692,8
Banjarbaru	328,83	5	20	248,4
Kalimantan Selatan	**37 530,52**	**152**	**2 008**	**4 119,8**

Sumber: Kalimantan Selatan Dalam Angka 2018

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 2. Jumlah Kantor Polisi Menurut Kabupaten/Kota dan Wilayah Kerja, 2017

Kabupaten/Kota	Polda	Polres/ Polresta	Polsek/ Polsekta	Pos Polisi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	0	1	9	1
Kotabaru	0	1	18	5
Banjar	0	1	14	3
Barito Kuala	0	1	17	3
Tapin	0	1	12	1
Hulu Sungai Selatan	0	1	10	3
Hulu Sungai Tengah	0	1	9	NA
Hulu Sungai Utara	0	1	7	1
Tabalong	0	1	12	NA
Tanah Bumbu	0	1	10	3
Balangan	0	1	6	2
Banjarmasin	1	1	6	20
Banjarbaru	0	1	5	3
Jumlah	**1**	**13**	**135**	**45*)**

Sumber: Polres Se-Kalimantan Selatan dan Polda Kalimantan Selatan

Catatan
NA = Data tidak tersedia
*) = Tidak Termasuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Tabalong

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 3. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Keberadaan Pos Polisi dan Kemudahan Akses ke Pos Polisi Terdekat, Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang Ada Pos Polisi (Termasuk Polsek, Polres dan Polda)		Akses ke Pos Polisi Terdekat (Bagi Desa/Kelurahan yang Tidak Ada Pos Polisi)			
	Ada	Tidak Ada	Sangat Mudah	Mudah	Sulit	Sangat Sulit
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanah Laut	15	120	20	87	11	2
Kotabaru	37	165	22	94	41	8
Banjar	21	269	38	185	44	2
Barito Kuala	20	181	34	109	31	7
Tapin	15	120	20	83	17	0
Hulu Sungai Selatan	12	136	37	90	8	1
Hulu Sungai Tengah	14	155	63	81	6	5
Hulu Sungai Utara	10	209	25	169	14	1
Tabalong	17	114	23	81	6	4
Tanah Bumbu	20	129	20	78	23	8
Balangan	8	149	19	121	9	0
Banjarmasin	19	33	26	7	0	0
Banjarbaru	9	11	3	8	0	0
Jumlah	**217**	**1 791**	**350**	**1 193**	**210**	**38**

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2014

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 4. Jumlah Anggota Hansip/Linmas dan Rasio Hansip/Linmas per Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota, 2014

Kabupaten/Kota	Jumlah Anggota Hansip / Linmas	Jumlah Desa/ Kelurahan	Rasio Hansip / Linmas per Desa/Kelurahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	1 457	135	11
Kotabaru	1 595	202	8
Banjar	2 788	290	10
Barito Kuala	854	201	4
Tapin	408	134	3
Hulu Sungai Selatan	470	148	3
Hulu Sungai Tengah	730	169	4
Hulu Sungai Utara	872	219	4
Tabalong	1 455	131	11
Tanah Bumbu	1 880	150	13
Balangan	185	157	1
Banjarmasin	263	52	5
Banjarbaru	308	20	15
Kalimantan Selatan	**13 265**	**2 008**	**7**

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2014

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 5. Jumlah Tindak Kejahatan yang Dilaporkan (*Crime Total*) Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017*)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	422	187	307
Kotabaru	518	514	641
Banjar	742	779	579
Barito Kuala	264	229	167
Tapin	422	432	335
Hulu Sungai Selatan	342	343	NA
Hulu Sungai Tengah	295	239	199
Hulu Sungai Utara	202	174	168
Tabalong	234	280	212
Tanah Bumbu	610	412	570
Balangan	131	143	112
Banjarmasin	1 996	1 685	1 885
Banjarbaru	392	369	319
Jumlah	**6 570**	**5 786**	**5 494****)

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan
NA = Data tidak tersedia
*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
**) = Tidak Termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 6. Jumlah Tindak Kejahatan yang Diselesaikan (*Crime Cleared*) Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017*)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	353	219	291
Kotabaru	388	452	559
Banjar	566	518	492
Barito Kuala	198	168	127
Tapin	369	396	271
Hulu Sungai Selatan	269	317	NA
Hulu Sungai Tengah	207	182	151
Hulu Sungai Utara	174	128	114
Tabalong	228	229	176
Tanah Bumbu	457	344	407
Balangan	90	103	85
Banjarmasin	1 622	1 348	1 419
Banjarbaru	278	294	282
Jumlah	**5 199**	**4 698**	**4 374**[**)]

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan
NA = Data tidak tersedia
*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
**) = Tidak Termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 7. Persentase Penyelesaian Tindak Kejahatan (*Crime Clearance Rate*) Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017*)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	83,6	117,1	94,8
Kotabaru	74,9	87,9	87,2
Banjar	76,3	66,5	85,0
Barito Kuala	75,0	73,4	76,0
Tapin	87,4	91,7	80,9
Hulu Sungai Selatan	78,7	92,4	NA
Hulu Sungai Tengah	70,2	76,2	75,9
Hulu Sungai Utara	86,1	73,6	67,9
Tabalong	97,4	81,8	83,0
Tanah Bumbu	74,9	83,5	71,4
Balangan	68,7	72,0	75,9
Banjarmasin	81,3	80,0	75,3
Banjarbaru	70,9	79,7	88,4
Kalimantan Selatan	**79,1**	**81,2**	**79,6****)

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan
NA = Data tidak tersedia
*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
**) = Tidak Termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 8. Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana (*Crime Clock*) Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017*)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	20 jam 45' 30"	46 jam 50' 42"	28 jam 3’ 4”
Kotabaru	16 jam 54' 41"	17 jam 2' 35"	13 jam 39’ 59”
Banjar	11 jam 48' 22"	11 jam 14' 43"	15 jam 7' 47"
Barito Kuala	33 jam 10' 55"	38 jam 15' 12"	52 jam 27' 19"
Tapin	20 jam 45' 30"	20 jam 16' 41"	26 jam 8' 58"
Hulu Sungai Selatan	25 jam 36' 51"	25 jam 32' 22"	NA
Hulu Sungai Tengah	29 jam 41' 42"	36 jam 39' 10"	44 jam 1' 13"
Hulu Sungai Utara	43 jam 21' 59”	50 jam 20' 42"	52 jam 8' 35"
Tabalong	37 jam 26' 10"	31 jam 17' 9"	41 jam 19' 15"
Tanah Bumbu	14 jam 21' 39"	21 jam 15' 44"	15 jam 22' 7"
Balangan	66 jam 52' 13"	61 jam 15' 32"	78 jam 12' 52"
Banjarmasin	4 jam 23' 20"	5 jam 11' 56"	4 jam 38' 50"
Banjarbaru	22 jam 20' 49"	23 jam 44' 24"	27 jam 27' 39"
Rata-rata Kalsel	**1 jam 20' 00"**	**1 jam 30' 51"**	**1 jam 35' 41" **)**

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan
NA = Data tidak tersedia
*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
**) = Tidak Termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 9. Risiko Penduduk Terkena Tindak Kejahatan (*Crime Rate*) per 100.000 Penduduk Menurut Kabupaten/Kota, 2015-2017*)

Kabupaten/Kota	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	130	57	92
Kotabaru	162	158	193
Banjar	134	138	101
Barito Kuala	89	76	55
Tapin	232	234	179
Hulu Sungai Selatan	151	149	NA
Hulu Sungai Tengah	113	91	75
Hulu Sungai Utara	90	76	73
Tabalong	98	115	86
Tanah Bumbu	188	123	166
Balangan	106	114	88
Banjarmasin	296	246	272
Banjarbaru	167	153	128
Rata-rata Kalsel	**165**	**143**	**133****)

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan
NA = Data tidak tersedia
*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan
**) = Tidak Termasuk Kabupaten Hulu Sungai Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 10. Banyaknya Desa/Kelurahan yang Mengalami Tindak Kejahatan Selama Setahun Terakhir Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan, Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Pencurian	Pencurian Dengan Kekerasan	Penipuan/ Penggelapan	Penganiayaan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	87	4	9	5
Kotabaru	51	4	7	3
Banjar	111	15	21	14
Barito Kuala	79	3	7	7
Tapin	49	3	10	6
Hulu Sungai Selatan	45	2	2	4
Hulu Sungai Tengah	77	5	10	8
Hulu Sungai Utara	58	2	6	1
Tabalong	86	0	9	7
Tanah Bumbu	84	6	18	4
Balangan	99	3	4	3
Banjarmasin	47	22	36	42
Banjarbaru	16	4	11	6
Kalimantan Selatan	**889**	**73**	**150**	**110**

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2014

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 10. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Pembakaran	Perkosaan	Penyalah-gunaan / Peredaran Narkoba	Perjudian
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tanah Laut	1	1	36	34
Kotabaru	3	1	30	8
Banjar	0	4	42	44
Barito Kuala	0	3	20	27
Tapin	0	4	21	12
Hulu Sungai Selatan	1	2	32	18
Hulu Sungai Tengah	1	1	32	31
Hulu Sungai Utara	0	3	14	13
Tabalong	2	1	20	45
Tanah Bumbu	2	1	17	13
Balangan	0	2	14	16
Banjarmasin	8	0	28	17
Banjarbaru	0	2	6	5
Kalimantan Selatan	**18**	**25**	**312**	**283**

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2014

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 10. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Pembunuhan	Perdagangan	Tidak Ada Tindak Kejahatan
(1)	(10)	(11)	(12)
Tanah Laut	8	0	41
Kotabaru	4	0	131
Banjar	8	0	144
Barito Kuala	2	0	109
Tapin	4	0	72
Hulu Sungai Selatan	4	0	79
Hulu Sungai Tengah	4	0	80
Hulu Sungai Utara	6	0	147
Tabalong	2	0	34
Tanah Bumbu	5	0	59
Balangan	4	0	52
Banjarmasin	12	0	0
Banjarbaru	1	0	1
Kalimantan Selatan	**64**	**0**	**949**

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2014

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 11. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Perkelahian Massal Setahun Terakhir Tahun 2014

Kabupaten/Kota	Antar Kelompok Warga	Warga Antar Desa/Kelurahan	Warga Dengan Aparat Keamanan
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	0	0	0
Kotabaru	0	1	0
Banjar	0	3	0
Barito Kuala	0	0	0
Tapin	0	0	0
Hulu Sungai Selatan	2	1	0
Hulu Sungai Tengah	1	1	0
Hulu Sungai Utara	1	0	0
Tabalong	0	0	0
Tanah Bumbu	2	3	0
Balangan	3	2	0
Banjarmasin	0	0	0
Banjarbaru	0	0	0
Kalimantan Selatan	**9**	**11**	**0**

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2014

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 11. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Warga Dengan Aparat Pemerintah	Antar Pelajar/ Mahasiswa	Antar Suku	Lainnya
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)
Tanah Laut	0	0	0	0
Kotabaru	0	0	0	0
Banjar	0	0	0	2
Barito Kuala	0	0	0	1
Tapin	0	0	0	0
Hulu Sungai Selatan	0	0	0	1
Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0
Hulu Sungai Utara	0	0	0	0
Tabalong	0	0	0	0
Tanah Bumbu	1	1	0	0
Balangan	0	1	0	0
Banjarmasin	0	0	0	0
Banjarbaru	0	0	0	0
Kalimantan Selatan	**1**	**2**	**0**	**4**

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2014

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 12. Jumlah Tindak Kejahatan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Tindak Kejahatan Tahun 2017*)

Kabupaten/Kota	Pembunuhan	Penganiayaan Berat	Penganiayaan Ringan	Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	4	7	7	3
Kotabaru	4	23	1	6
Banjar	1	26	2	6
Barito Kuala	1	2	1	1
Tapin	1	8	1	4
Hulu Sungai Selatan	3	27	0	0
Hulu Sungai Tengah	2	12	0	0
Hulu Sungai Utara	0	2	3	0
Tabalong	0	14	0	2
Tanah Bumbu	4	2	29	5
Balangan	0	7	2	0
Banjarmasin	7	86	61	15
Banjarbaru	1	4	10	3
Jumlah	**28**	**220**	**117**	**45**

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan
*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 12. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Perkosaan	Pencabulan	Penculikan	Pencurian Dengan Kekerasan
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)
Tanah Laut	0	1	0	8
Kotabaru	1	1	1	4
Banjar	0	1	0	4
Barito Kuala	9	0	0	5
Tapin	1	4	0	6
Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0
Hulu Sungai Tengah	0	1	0	6
Hulu Sungai Utara	0	0	0	1
Tabalong	1	9	0	6
Tanah Bumbu	0	3	0	10
Balangan	1	2	0	4
Banjarmasin	1	2	0	26
Banjarbaru	1	3	0	3
Jumlah	**15**	**27**	**1**	**83**

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan
*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 12. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Pencurian Biasa	Pencurian Kendaraan Bermotor	Pencurian Dengan Pemberatan	Pengrusakan / Pengahancuran Barang
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tanah Laut	22	16	60	0
Kotabaru	27	19	21	1
Banjar	42	52	50	0
Barito Kuala	7	19	31	0
Tapin	11	21	25	1
Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0
Hulu Sungai Tengah	14	20	31	2
Hulu Sungai Utara	15	13	5	0
Tabalong	26	27	46	0
Tanah Bumbu	46	78	56	0
Balangan	3	8	25	2
Banjarmasin	125	96	80	8
Banjarbaru	23	37	57	2
Jumlah	**361**	**406**	**487**	**16**

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan
*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 12. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Pembakaran dengan Sengaja	Narkotika dan Psikotropika	Penipuan / Perbuatan Curang
(1)	(14)	(15)	(16)
Tanah Laut	2	76	5
Kotabaru	0	26	6
Banjar	2	73	18
Barito Kuala	1	0	6
Tapin	0	35	8
Hulu Sungai Selatan	0	0	0
Hulu Sungai Tengah	0	100	1
Hulu Sungai Utara	0	77	0
Tabalong	0	0	12
Tanah Bumbu	0	0	21
Balangan	8	1	6
Banjarmasin	0	163	110
Banjarbaru	0	137	39
Jumlah	**13**	**688**	**232**

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan
*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 12. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Penggelapan	Korupsi	Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum
(1)	(17)	(18)	(19)
Tanah Laut	9	2	0
Kotabaru	23	1	3
Banjar	20	1	32
Barito Kuala	4	0	0
Tapin	6	0	0
Hulu Sungai Selatan	0	0	0
Hulu Sungai Tengah	10	0	0
Hulu Sungai Utara	2	1	0
Tabalong	19	1	0
Tanah Bumbu	29	0	0
Balangan	8	0	0
Banjarmasin	74	0	421
Banjarbaru	19	2	0
Jumlah	**223**	**8**	**456**

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan
*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 13. Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota dan Kegiatan Warga Untuk Menjaga Keamanan Lingkungan Selama Setahun Terakhir, 2014

Kabupaten/Kota	Pembangunan /Pemeliharaan Pos Keamanan Lingkungan	Pembentukan /Pengaturan Regu Keamanan	Penambahan Jumlah Anggota Hansip /Linmas	Pelaporan Tamu yang Menginap Lebih Dari 24 Jam ke Aparat Lingkungan	Pengaktifan Sistem Keamanan Lingkungan Berasal Dari Inisiatif Warga
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanah Laut	83	50	33	105	82
Kotabaru	148	104	53	130	107
Banjar	156	106	128	205	158
Barito Kuala	72	27	2	104	83
Tapin	93	33	6	76	62
Hulu Sungai Selatan	101	45	15	95	75
Hulu Sungai Tengah	52	21	9	71	64
Hulu Sungai Utara	110	45	23	84	52
Tabalong	113	72	29	74	66
Tanah Bumbu	117	91	37	81	81
Balangan	80	19	9	40	23
Banjarmasin	22	14	12	42	36
Banjarbaru	20	13	12	17	14
Kalimantan Selatan	**1 167**	**640**	**368**	**1 124**	**903**

Sumber: BPS, Pendataan Potensi Desa 2014

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 14. Jumlah Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014 Menurut Kabupaten/Kota dan Partai Politik

Kabupaten/Kota	Nasdem	PKB	PKS	PDI-P	Golkar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanah Laut	4	2	2	8	4
Kotabaru	6	3	4	4	4
Banjar	4	4	1	4	16
Barito Kuala	0	4	4	4	13
Tapin	0	4	1	3	9
Hulu Sungai Selatan	5	3	6	2	5
Hulu Sungai Tengah	1	0	3	2	8
Hulu Sungai Utara	1	4	2	1	13
Tabalong	2	2	1	0	5
Tanah Bumbu	3	5	1	10	3
Balangan	2	1	3	1	5
Banjarmasin	1	6	4	5	8
Banjarbaru	3	3	1	4	5
Kalimantan Selatan	**3**	**6**	**5**	**8**	**13**

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Provinsi Kalimantan Selatan

Keterangan :
1. Nasdem : Nasional Demokrat
2. PKB : Partai Kebangkitan Bangsa
3. PKS : Partai Keadilan Sejahtera
4. PDI-P : Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
5. Golkar : Partai Golongan Karya

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 14. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Gerindra	Demokrat	PAN	PPP
(1)	(7)	(8)	(9)	(10)
Tanah Laut	5	2	2	3
Kotabaru	2	3	2	4
Banjar	6	3	0	8
Barito Kuala	4	0	3	1
Tapin	2	3	1	2
Hulu Sungai Selatan	3	2	0	1
Hulu Sungai Tengah	5	0	1	4
Hulu Sungai Utara	0	1	1	4
Tabalong	3	4	5	2
Tanah Bumbu	5	1	2	2
Balangan	1	0	2	5
Banjarmasin	3	5	4	5
Banjarbaru	4	3	2	4
Kalimantan Selatan	**6**	**4**	**1**	**7**

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Provinsi Kalimantan Selatan

Keterangan :
6. Gerindra : Partai Gerakan Indonesia Raya
7. PAN : Partai Amanat Nasional
8. PPP : Partai Persatuan Pembangunan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 14. Lanjutan

Kabupaten/Kota	Hanura	PKPI	PBB	Jumlah
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tanah Laut	2	1	0	35
Kotabaru	2	0	1	35
Banjar	0	0	0	45
Barito Kuala	2	0	0	35
Tapin	0	0	0	25
Hulu Sungai Selatan	1	1	1	30
Hulu Sungai Tengah	1	2	3	30
Hulu Sungai Utara	2	0	1	30
Tabalong	3	1	2	30
Tanah Bumbu	3	0	0	35
Balangan	1	2	2	25
Banjarmasin	3	0	1	45
Banjarbaru	1	0	0	30
Kalimantan Selatan	**2**	**0**	**0**	**55**

Sumber: Badan Kesbangpolinmas Provinsi Kalimantan Selatan

Keterangan :
9. Hanura : Partai Hati Nurani Rakyat
10. PKPI : Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia
11. PBB : Partai Bulan Bintang

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 15. Jumlah Anggota Legislatif Hasil Pemilu 2014 Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin (Kondisi 31 Desember 2017)

Kabupaten/Kota	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah Laut	29	6	35
Kotabaru	27	8	35
Banjar	34	11	45
Barito Kuala	29	6	35
Tapin	21	4	25
Hulu Sungai Selatan	26	4	30
Hulu Sungai Tengah	23	7	30
Hulu Sungai Utara	25	5	30
Tabalong	23	7	30
Tanah Bumbu	33	2	35
Balangan	22	3	25
Banjarmasin	37	8	45
Banjarbaru	23	7	30
Kalimantan Selatan	**48**	**7**	**55**

Sumber: Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 16. Waktu Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Terakhir Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Waktu Pelaksanaan Pemilukada Terakhir
(1)	(2)
Tanah Laut	27 Juni 2018
Kotabaru	9 Desember 2015
Banjar	9 Desember 2015
Barito Kuala	15 Februari 2017
Tapin	27 Juni 2018
Hulu Sungai Selatan	27 Juni 2018
Hulu Sungai Tengah	9 Desember 2015
Hulu Sungai Utara	15 Februari 2017
Tabalong	27 Juni 2018
Tanah Bumbu	9 Desember 2015
Balangan	9 Desember 2015
Banjarmasin	9 Desember 2015
Banjarbaru	9 Desember 2015
Kalimantan Selatan	**9 Desember 2015**

Sumber: KPUD Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 17. Jumlah Penduduk yang Terdaftar. Menggunakan Hak Pilih. dan Hasil Perolehan Suara Sah, Suara Tidak Sah dan Tidak Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilu Gubernur 2015 Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Terdaftar		Menggunakan Hak Pilih		Tidak Menggunakan Hak Pilih
	Terdaftar di DPT	Pemilih dengan KTP/Surat Keterangan	Suara Sah	Suara Tidak Sah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tanah Laut	243 861	1 090	148 788	4 808	91 355
Kotabaru	227 266	7 534	157 488	6 682	70 630
Banjar	434 857	4 108	248 002	24 169	166 794
Barito Kuala	218 951	2 187	152 115	5 575	63 448
Tapin	130 534	22	96 812	5 926	27 818
Hulu Sungai Selatan	169 074	166	115 930	6 058	47 252
Hulu Sungai Tengah	192 126	2 356	139 521	10 478	44 483
Hulu Sungai Utara	158 629	686	104 980	7 971	46 364
Tabalong	168 436	4 626	122 716	3 324	47 022
Tanah Bumbu	228 894	4 099	134 214	6 969	91 810
Balangan	89 005	689	59 600	6 643	23 451
Banjarmasin	436 956	8 425	266 045	23 810	155 526
Banjarbaru	144 885	3 659	87 117	7 880	53 547
Kalimantan Selatan	**2 856 388**	**40 669**	**1 799 885**	**122 061**	**975 111**

Sumber: KPUD Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 18. Jumlah Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Terakhir Jumlah Putaran Pelaksanaan Pemilukada, Perolehan Suara Pasangan Calon Kepala Daerah Terpilih dan Nama Partai Pengusung Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta		Jumlah Putaran Pelak-sanaan	Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Terpilih		Partai Pengusung Calon Terpilih
	Duku-ngan Parpol	Perora-ngan		Jumlah	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanah Laut	2	0	1	107 899	62,33%	Partai Gerindra, PKPI, dan PKS
Kotabaru	6	2	1	44 873	28,49%	PPP, Partai Golkar
Banjar	4	1	1	114 863	46,32%	PKB, Partai Nasdem, PKPI
Barito Kuala	3	0	1	74 169	48,76%	Partai Golkar
Tapin	1	0	1	85 826	80,89%	PAN, PKS, PPP, Gerindra, Demokrat, PDIP, PKB, dan Partai Golkar
Hulu Sungai Selatan	1	1	1	78 281	65,47%	PKS, Partai Golkar, NasDem, Gerindra, Demokrat dan PBB
Hulu Sungai Tengah	3	1	1	84 297	60,41%	PKS, PBB, Partai Gerindra, Partai Golkar
Hulu Sungai Utara	2	0	1	72 265	68,84%	Partai Golkar, PPP, Partai Hanura, PKS, Partai Demokrat, PBB
Tabalong	2	2	1	44 736	35,92%	PDIP, Partai Golkar, PAN, Nasdem, Demokrat, PKS, PBB, PKB, dan PKPI.
Tanah Bumbu	2	1	1	106 998	79,72%	PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Demokrat, PAN, Partai Hanura
Balangan	4	2	1	25 064	42,05%	PDIP, Partai Nasdem, Partai Hanura, PKB, PPP, PBB
Banjarmasin	3	1	1	147 742	55,53%	PKS, PDIP, PAN, Partai Gerindra Gerindra dan Partai Hanura
Banjarbaru	3	1	1	40 715	46,73%	Independen
Kalimantan Selatan	**3**	**1**	**1**	**739 588**	**41,09%**	**Partai Gerindra, PPP, PDI-P, PKS, Partai Hanura, PAN, Partai Golkar**

Sumber: KPUD Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 19. Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Terakhir serta Jabatan Sebelum Terpilih Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Usia Saat Pelantikan	Pendidikan Terakhir	Jabatan / Pekerjaan Sebelum Terpilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	Laki-laki	55	S1	Wakil Bupati Tanah Laut
Kotabaru	Laki-laki	53	S1	Wiraswasta/Pengusaha
Banjar	Laki-laki	70	Madrasah Aliyah (MA)	Guru Agama
Barito Kuala	Perempuan	58	S1	Ketua DPRD Provinsi Kalsel
Tapin	Laki-laki	63	S2	Bupati Tapin
Hulu Sungai Selatan	Laki-laki	62	S2	Bupati Hulu Sungai Selatan
Hulu Sungai Tengah	Laki-laki	48	S2	Pengusaha
Hulu Sungai Utara	Laki-laki	57	S2	Bupati Hulu Sungai Utara
Tabalong	Laki-laki	58	S2	Bupati Tabalong
Tanah Bumbu	Laki-laki	34	S2	Bupati Tanah Bumbu
Balangan	Laki-laki	58	S2	Wakil Bupati Balangan
Banjarmasin	Laki-laki	41	S2	DPRD Provinsi
Banjarbaru	Laki-laki	46	S2	Camat Landasan Ulin
Kalimantan Selatan	**Laki-laki**	**48**	**S2**	**Direktur Jhonlin Sasangga Banua**

Sumber: KPUD Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 20. Hasil Pemilihan Umum Wakil Kepala Daerah Menurut Jenis Kelamin, Usia dan Pendidikan Terakhir serta Jabatan Sebelum Terpilih Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jenis Kelamin	Usia Saat Pelantikan	Pendidikan Terakhir	Jabatan / Pekerjaan Sebelum Terpilih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	Laki-laki	44	S1	Anggota DPRD Kab. Tanah Laut
Kotabaru	Laki-laki	52	S1	Swasta
Banjar	Laki-laki	29	SMA	Anggota DPRD Kab. Banjar
Barito Kuala	Perempuan	42	S1	Anggota DPRD Kab. Barito Kuala
Tapin	Laki-laki	50	S1	Swasta
Hulu Sungai Selatan	Laki-laki	46	S1	Anggota DPRD Kab. Hulu Sungai Selatan
Hulu Sungai Tengah	Laki-laki	62	S1	Pensiunan PNS
Hulu Sungai Utara	Laki-laki	61	S1	Wakil Bupati Hulu Sungai Utara
Tabalong	Laki-laki	61	S2	Anggota DPRD Kab. Tabalong
Tanah Bumbu	Laki-laki	43	SMA	Pengusaha
Balangan	Laki-laki	46	D2	Pengusaha
Banjarmasin	Laki-laki	50	SLTA	Anggota DPRD Provinsi
Banjarbaru	Laki-laki	47	S1	Anggota DPRD
Kalimantan Selatan	**Laki-laki**	**55**	**S2**	**Wakil Gubernur Kalimantan Selatan**

Sumber: KPUD Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 21. Jumlah Peraturan Daerah yang Dihasilkan Menurut DPRD Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi Kalmantan Selatan Tahun 2016-2017

Kabupaten/Kota	Peraturan Daerah		Peraturan Daerah Inisiatif (Prakarsa) DPRD	
	2016	2017	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	11	12	0	1
Kotabaru	24	19	5	5
Banjar	14	1	1	7
Barito Kuala	14	10	2	1
Tapin	16	21	4	6
Hulu Sungai Selatan	16	17	1	0
Hulu Sungai Tengah	15	18	3	0
Hulu Sungai Utara	12	14	3	5
Tabalong	10	1	0	1
Tanah Bumbu	21	21	4	10
Balangan	23	1	0	1
Banjarmasin	17	8	2	5
Banjarbaru	20	20	5	2
Kalimantan Selatan	**11**	**15**	**3**	**5**

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 22. Jumlah Organisasi Massa yang Terdaftar Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2016-2017

Kabupaten/Kota	2016		2017	
	Mendaftar Tahun Ini	Jumlah Terdaftar	Mendaftar Tahun Ini	Jumlah Terdaftar
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tanah Laut	6	43	531	574
Kotabaru	778	778	813	813
Banjar	46	125	14	147
Barito Kuala	21	34	2	31
Tapin	4	42*	0	54
Hulu Sungai Selatan	21	69	8	77
Hulu Sungai Tengah	142	142	35	35
Hulu Sungai Utara	141	141	40	222
Tabalong	3	40	2	42
Tanah Bumbu	150	259	10	259
Balangan	156	156	21	21
Banjarmasin	6	597	18	234
Banjarbaru	1	38	8	46
Kalimantan Selatan	**44**	**207**	**16**	**223**

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota dan Provinsi Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

Tabel 23. Jumlah Demonstrasi/Unjuk Rasa dan Kerusuhan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2016-2017

Kabupaten/Kota	2016			2017		
	Jumlah Demon-strasi	Demon-strasi Rusuh	Jumlah Kerusu-han	Jumlah Demon-strasi	Demon-strasi Rusuh	Jumlah Kerusu-han
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tanah Laut	5	0	0	5	0	0
Kotabaru	9	0	0	6	0	0
Banjar	0	0	0	0	0	0
Barito Kuala	0	0	0	5	0	0
Tapin	0	0	0	0	0	0
Hulu Sungai Selatan	0	0	0	0	0	0
Hulu Sungai Tengah	0	0	0	0	0	0
Hulu Sungai Utara	3	0	0	0	0	0
Tabalong	0	0	0	0	0	0
Tanah Bumbu	4	0	0	0	0	0
Balangan	0	0	0	0	0	0
Banjarmasin	57	0	0	73	0	0
Banjarbaru	0	0	0	0	0	0
Jumlah	**78**	**0**	**0**	**89**	**0**	**0**

Sumber: Polres dan Polresta Se-Kalimantan Selatan.

Catatan
*) = Tidak Termasuk Kasus yang ditangani Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan

https://kalsel.bps.go.id

SENSUS EKONOMI 2016

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://kalsel.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jalan Soekarno-Hatta (Jalur Trikora) No. 7 Banjarbaru 70713
Telp. 0511-6749001 Fax. 0511-6749106
Homepage http://kalsel.bps.go.id, Email: bps6300@bps.go.id

ISBN 978-602-0934-87-7
9 786020 934877